



Raperda Disabilitas Selesai Akhir Tahun

YOGYAKARTA - Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemenuhan dan penguatan hak disabilitas ditargetkan rampung akhir tahun ini. Saat ini, draf berada di tangan Kanwil Kemenkumham DIY yang diminta ikut mendampingi.

"Kita sepakat minta bantuan Kanwil Kemenkumham mengingat waktunya sangat terbatas. Harus selesai tahun ini karena tidak bisa lagi diluncurkan, baru setelah itu dilakukan uji publik," kata Ketua Pansus Raperda Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan, kemarin.

Dengan menggandeng Kanwil Kemenkumham DIY dalam penyusunan raperda, pihaknya menginginkan agar tidak lagi disibukkan dengan urusan redaksional. Menurut dia, materi pembahasan bersama tim eksekutif sebenarnya hanya tinggal sedikit.

Fauzan mengaku ada kendala dalam proses penyusunan rancangan peraturan ini

lantaran draf belum siap. Draft yang diajukan dari tim pengusul tidak bisa digunakan karena ada persoalan teknis.

"Draft yang disampaikan ke Kanwil Kemenkumham sudah final. Kami telah berupaya merangkul semua penyandang disabilitas, serta memasukkan unsur muatan lokal," imbuhnya.

Ketua Komite Disabilitas DIY Setia Adi Purwanta meminta di tengah waktu yang mepet ini, raperda tetap harus memberikan hasil yang terbaik serta mengakomodasi seluruh hak penyandang difabel sebagaimana diatur dalam UU Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Hak azasi tidak boleh ditunda. Kalau pemerintah beralasan belum mampu, bisa menggunakan cara rencana aksi daerah. Di dalam perda nantinya harus tercantum tahapan pencapaian yang jelas," tandasnya. (J1-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005